

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. S. S. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Puporis, Jakarta, 2002.
- A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Buku Kompas, Universitas Michigan, 2002.
- Abdul Hakim G. Nusantara, dan Benny K. Harman. *Analisa Dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli: Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*. Elex Media Komputindo: Bank Naskah Gramedia, Kelompok Gramedia, 1999.
- Awaludin Marwan dan Satjipto Rahardjo, *Sebuah Biografi Intelektual; Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif*, Thafa Media, 2013.
- Hasyimzoem, Yusnani dkk, *HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH*, edisi Pertama, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- J. Wayong, *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Djambatan, Jakarta, 1975.
- Leonard Bauer, Herbert Matis (1988) *From moral to political economy: The Genesis of social sciences, History of European Ideas 9 (2)*.
- Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang, 2012.
- M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

M. Nasroen, *Masalah-Masalah Sekitar Otonomi Daerah*, Wolters, Jakarta, 1951.

Michael J. Baker, Michael Saren, *Marketing Theory: A Student Text*, SAGE 2010.

Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

_____, *Politik Hukum Indonesia*. Pustaka LP3ES Indonesia, 1998.

Moh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid 1, Penerbit Siguntang, Jakarta, 1971.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009.

_____, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, tanpa tahun.

Ni'matul Huda, dkk, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017.

Ottom Holman, et al. *Neoliberal Hegemony and the Political Economy of European Restructuring (1)*. Sharpe, 1999.

P. Kotler, Keller K.L., *Marketing Management*, Prentice Hall 2011.

Padmo Wahjono. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Ctk. Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Patrik Aspers, *Markets*, Polity Press 2011.

- Riawan Tjandra, *Legislative Drafting: Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009.
- Robert H. Frank, *Microeconomics and Behavior*, 6th ed., McGraw-Hill/Irwin 2006.
- Robert S Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld, *Microeconomics*, Prentice Hall 2012.
- Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitualisme Indonesia*, Indepth, Bandar Lampung, 2012.
- Sarman, *Mohammad Taufik Makaraq, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, tanpa tahun.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008.
- Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983,
- Soehino, *Perkembangan Pemerintah di Daerah*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Sunaryati Hartono, et al. *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Liber Amicorum Untuk Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Syarif Saleh, *Otonomi dan Daerah Otonom*, Endang, Jakarta, 1953.
- Yusnani Hasyimzum, *Penguatan Institusional Pemekaran Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

Yusnani Hasyimzum, et.al, *HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH*, Ed, 1, Cet. 1,
Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan
Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Kemitraan.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pusat Perbelanjaan di Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033.

C. Risalah Sidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo,
Acara Perubahan Program Legislasi Daerah 2014, Persetujuan Raperda
dan
Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun Anggaran 2015.

